

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemangku kebijakan, pelaksana dan penerima kebijakan memahami substansi kebijakan ASI eksklusif, berkomitmen dalam pelaksanaan dan memberikan respon dukungan positif berupa saran yang membangun untuk peningkatan cakupan pemberian ASI eksklusif di Kota Depok.
- b. Struktur birokrasi implementasi program ASI eksklusif di Kota Depok ditinjau melalui adanya kerjasama lintas sektor dan lintas program. Fragmentasi organisasi terlaksana dengan sistem koordinasi yang terintegrasi. SOP ASI eksklusif dan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui tersedia di Puskesmas Cipayung Kota Depok.
- c. Nutrisionis atau ahli gizi terlatih (tenaga konselor ASI) bertanggung jawab atas program ASI eksklusif di Puskesmas dan bekerjasama dengan tenaga kesehatan lain. Bahan informasi dalam implementasi program disediakan. Fasilitas dan sarana pendukung pelaksanaan program tersedia di Kota Depok, namun beberapa tempat umum dan tempat kerja tidak memiliki ruang menyusui. Anggaran khusus ASI eksklusif tersedia di Puskesmas, namun pada tahun 2020 dana harus dialihkan untuk keperluan penanggulangan Covid-19.
- d. Komunikasi terlaksana ditinjau dari sosialisasi program ASI eksklusif tahun 2020. Adanya pandemi covid-19 mempengaruhi sosialisasi program. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pemberian ASI eksklusif menjadi salah satu kendala.
- e. Program ASI eksklusif belum terlaksana secara optimal, namun pelaksanaannya sudah sesuai dengan pedoman Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan, yakni dengan cakupan 68,75% pada tahun 2020. Pemerintah Kota Depok membentuk 2 produk hukum mengenai ASI

eksklusif yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (Perda KIBBLA) dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah. Ruang menyusui di Depok sudah tersedia namun belum menyeluruh dan belum ada monitoring evaluasi. Sosialisasi PP 33 tahun 2012 tidak terlaksana namun ada sosialisasi peraturan lain terkait ASI eksklusif. Implementasi program ASI eksklusif dilakukan berupa pelayanan konsultasi, pendidikan ASI eksklusif dan promosi menyusui kepada sasaran program di Puskesmas Cipayung. Training konselor ASI pernah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok.

## **V.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi program ASI eksklusif di Kota Depok, saran yang diberikan peneliti yaitu sebagai berikut:

### **V.2.1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Depok**

- a. Pendataan dapat dilakukan terpusat dan terorganisir bagi penyedia fasilitas pelayanan kesehatan mandiri seperti klinik, praktik dokter dan praktik bidan mandiri pada sistem informasi khusus yang datanya terkumpul oleh koordinator pusat dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk mengurangi peluang data yang tidak tercatat oleh Dinas Kesehatan Kota Depok. Selain itu, perlu dilakukan supervisi saat kegiatan turun lapangan di lingkungan masyarakat sebagai bentuk monitoring kegiatan di masyarakat
- b. Koordinasi dan kerjasama dengan bidang lintas sektor yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan tenaga konselor ASI seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) dan Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok dari instansi pemerintahan maupun pihak swasta yakni organisasi yang fokus pada kesehatan ibu dan anak dapat direncanakan agar pelaksanaannya dapat diestimasi dan lebih optimal. Rencana monitoring dan evaluasi fasilitas ruang menyusui dengan pihak luar yang terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

- dan DPAPMK juga dapat dilakukan sebagai bentuk penegakan peraturan ASI eksklusif.
- c. Dinas Kesehatan Kota Depok diharapkan dapat mengoptimalkan pengadaan sumber daya melalui pembaharuan media informasi ASI eksklusif seperti poster, leaflet, *flip chart* dan video edukasi untuk mempermudah sosialisasi program serta dapat menambah kuantitas dan meningkatkan kualitas SDM tenaga konselor ASI atau kelompok pendukung ASI lewat pelatihan.

### **V.2.2. Bagi Puskesmas Kecamatan Cipayung**

- a. Sosialisasi kebijakan yang mengatur tentang ASI eksklusif dapat dilakukan saat pelaksanaan program agar masyarakat mengetahui kebijakan sebagai dasar pelaksanaan program serta pentingnya pemberian ASI eksklusif. Sosialisasi program secara *online* dapat disederhanakan dengan pembinaan via *chat* dan penyampaian informasi sederhana lewat media sosial agar komunikasi dengan masyarakat tetap terlaksana.
- b. Pendelegasian tugas dan kerjasama dengan tenaga kesehatan dan kader posyandu yang berperan dalam pelaksanaan program ASI eksklusif serta pihak lain di luar Puskesmas seperti mahasiswa magang dari perguruan tinggi atau organisasi yang mengadakan kerjasama terkait upaya peningkatan cakupan ASI eksklusif dapat dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi tugas rangkap sehingga pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan dengan optimal.

### **V.2.3. Bagi Masyarakat**

Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mencari informasi dan mengikuti program kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas maupun Dinas Kesehatan sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif di Kota Depok dan memperoleh manfaat dari ASI eksklusif

#### V.2.4. Bagi Peneliti Lain

- a. Peneliti lain dapat melakukan riset metode kuantitatif untuk melihat hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian *stunting* di Kota Depok secara statistik sebagai pelengkap rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemangku kebijakan untuk evaluasi pelaksanaan program ASI eksklusif.
- b. Peneliti dapat melakukan riset pada program lainnya dalam Gerakan 1000 HPK lain seperti kunjungan balita ke posyandu dan pemberian makanan bayi dan anak sebagai upaya pendukung program penurunan *stunting* di Kota Depok.